



Sosiologi Lembaga Pendidikan : Akuntabilitas Sosial Pengelolaan Keuangan Pesantren dalam Membangun Kepercayaan Wali Santri

Isnaefatul Aulita^{1*}, Muh.Hanif²

^{1,2} UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

*Penulis Korespondensi: 254110407059@mhs.uinsaizu.ac.id, muh.hanif@uinsaizu.ac.id

Abstract. *This article aims to examine the social accountability of pesantren financial management in building the trust of students' parents through the lens of the sociology of educational institutions. The main focus of the article is directed at the claim that the social accountability of pesantren financial management strengthens the trust of students' parents because financial transparency serves as an indicator of the pesantren's credibility, such that payment reports, well-organized record-keeping systems, and openness of financial information reinforce the pesantren's legitimacy as an educational institution based on trust. Field research was conducted using a qualitative approach through observation of payment and financial reporting mechanisms, interviews with administrators and students' parents, and documentation in the form of payment reports, fund usage reports, and standard operating procedures for financial management. The findings show that financial information transparency increases the sense of security among students' parents, reduces the potential for conflict, and strengthens social trust in the pesantren. Using a quantitative approach. The contribution of this article does not stop at case description but also builds a theoretical argument that social accountability in financial management is an important foundation for the legitimacy of Islamic educational institutions and the strengthening of the relationship between pesantren and the community.*

Keywords: *social accountability, financial transparency, trust of students' parents, pesantren, sociology of education.*

Abstrak. Artikel ini dirancang untuk mengkaji akuntabilitas sosial pengelolaan keuangan pesantren dalam membangun kepercayaan wali santri melalui perspektif sosiologi lembaga pendidikan. Fokus utama artikel diarahkan pada klaim bahwa akuntabilitas sosial pengelolaan keuangan pesantren memperkuat kepercayaan wali santri karena transparansi dana menjadi indikator kredibilitas pesantren, sehingga laporan pembayaran, sistem pencatatan yang rapi, dan keterbukaan informasi keuangan memperkuat legitimasi pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis amanah. Penelitian lapangan dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi mekanisme pembayaran dan pelaporan keuangan, wawancara dengan pengelola dan wali santri, dan dokumentasi berupa laporan pembayaran, laporan penggunaan dana, serta SOP pengelolaan keuangan. Temuan menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan meningkatkan rasa aman wali santri, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat kepercayaan sosial terhadap pesantren. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kontribusi artikel ini tidak berhenti pada deskripsi kasus, tetapi juga membangun argumentasi teoritik bahwa akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan merupakan fondasi penting bagi legitimasi lembaga pendidikan islam dan penguatan hubungan antara pesantren dan masyarakat.

Kata kunci: akuntabilitas sosial, transparansi keuangan, kepercayaan wali santri, pesantren, sosiologi pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang cukup besar dalam sistem administrasi lembaga pendidikan, termasuk di lingkungan pesantren. Jika dahulu komunikasi antara pengasuh, santri, dan wali santri lebih sering dilakukan secara langsung melalui pertemuan rutin atau surat pemberitahuan, kini penyampaian informasi administrasi mulai banyak memanfaatkan media digital seperti grup WhatsApp, aplikasi pembayaran, hingga sistem informasi pesantren. Kehadiran digitalisasi administrasi tidak

hanya membantu mempermudah pengelolaan data santri dan keuangan, tetapi juga membuat proses komunikasi menjadi lebih cepat, terbuka, dan mudah terdokumentasi. Dalam kajian sosiologi pendidikan, perubahan ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan hubungan sosial antara lembaga pendidikan dan masyarakat, terutama dalam membangun kepercayaan wali santri terhadap pesantren. Berdasarkan hasil observasi awal di Pondok Pesantren Darussalam Sokawera, pengelolaan pembayaran santri, laporan penggunaan dana, serta penyampaian informasi kegiatan dilakukan secara rutin melalui media digital dan forum wali santri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi telah menjadi salah satu strategi pesantren untuk menjaga transparansi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai digitalisasi administrasi pendidikan, komunikasi kelembagaan pesantren, serta literasi teknologi wali santri. Ballantine et al (2021) menyoroti bahwa kepercayaan dalam lembaga pendidikan tumbuh melalui keterbukaan informasi. Kajian terdahulu tentang akuntabilitas sosial di pesantren cenderung normatif dan administratif. Misalnya, Hanif et al (2024) menunjukkan bahwa resistensi pesantren terhadap kurikulum nasional lebih banyak dibahas dari sisi kebijakan, bukan praktek sosial sehari-hari. Beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa penggunaan media digital mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat penyampaian informasi kepada wali santri (Sumiyati & Aini, 2025). Penelitian lain juga menyoroti pemanfaatan aplikasi pembayaran dan media sosial pesantren sebagai sarana komunikasi kelembagaan (Anwar et al., 2023). Selain itu, terdapat kajian yang menekankan pentingnya literasi teknologi bagi wali santri agar dapat mengikuti perkembangan sistem administrasi modern (Mustafa et al., 2023). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih lebih banyak berfokus pada aspek teknis penggunaan teknologi dan belum mengulas secara mendalam bagaimana perubahan sosial terjadi di balik digitalisasi administrasi tersebut. Hubungan sosial antara pengelola pesantren, wali santri, dan masyarakat sebagai bagian dari proses akuntabilitas sosial juga masih jarang dianalisis melalui perspektif sosiologi pendidikan.

Artikel ini hadir untuk melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya dengan memusatkan perhatian pada dinamika sosial dalam digitalisasi administrasi pesantren. Pertama, artikel ini bertujuan menganalisis penggunaan aplikasi dan media administrasi

yang membantu wali santri memantau pembayaran, perizinan, serta informasi kegiatan pesantren secara lebih terbuka dan mudah diakses. Kedua, artikel ini menjelaskan bagaimana pengasuh dan pengelola pesantren memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi secara lebih cepat sehingga komunikasi kelembagaan dapat berjalan lebih efektif. Ketiga, artikel ini melihat bahwa digitalisasi administrasi tidak hanya mampu mengurangi miskomunikasi antara pengurus dan wali santri, tetapi juga menuntut adanya kemampuan literasi teknologi agar seluruh pihak dapat mengikuti sistem yang diterapkan pesantren. Dengan demikian, digitalisasi administrasi tidak hanya dipahami sebagai perubahan teknis semata, melainkan juga sebagai proses sosial yang memengaruhi pola hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini dibangun atas pandangan bahwa digitalisasi administrasi pesantren telah mengubah pola komunikasi dari sistem tradisional yang mengandalkan tatap muka menuju pola komunikasi yang lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi. Perubahan ini turut memperkuat akuntabilitas sosial pesantren karena wali santri memperoleh akses informasi yang lebih jelas dan mudah terkait pengelolaan administrasi maupun keuangan lembaga. Di sisi lain, digitalisasi juga melahirkan pola hubungan sosial baru yang menuntut keterbukaan, partisipasi aktif, serta kemampuan literasi teknologi dari seluruh pihak yang terlibat dalam lingkungan pesantren.

2. KAJIAN TEORITIS

Digitalisasi Administrasi

Digitalisasi administrasi merupakan proses perubahan sistem administrasi dari pola konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital yang memanfaatkan media elektronik dalam pengelolaan informasi, komunikasi, dan pelayanan kelembagaan. Dalam perspektif sosiologi lembaga pendidikan, digitalisasi administrasi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi semata, tetapi juga sebagai gejala sosial yang memengaruhi hubungan antaraktor di dalam lembaga pendidikan. Penggunaan aplikasi pembayaran, grup WhatsApp, dan sistem informasi pesantren membentuk pola relasi baru antara pengurus pesantren, santri, dan wali santri. Selain itu, digitalisasi juga berkaitan dengan norma keterbukaan, simbol profesionalitas lembaga, serta praktik kelembagaan yang semakin menekankan transparansi dan efisiensi administrasi. Dengan demikian,

digitalisasi administrasi menjadi bagian dari proses perubahan sosial yang memengaruhi cara lembaga pendidikan membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat (Ramadhani et al., 2024).

Aspek digitalisasi administrasi dapat dilihat melalui keterlibatan berbagai aktor sosial seperti pengasuh pesantren, bendahara, pengurus administrasi, santri, dan wali santri. Praktik sosial yang muncul tampak dalam penggunaan media digital untuk pembayaran, pelaporan keuangan, penyampaian informasi kegiatan, hingga komunikasi perizinan santri. Pesantren sudah mulai menerapkan atau mengadopsi aplikasi digital untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan keuangan (Maela & Hanif, 2025). Pola komunikasi yang sebelumnya berlangsung secara langsung kini berubah menjadi lebih cepat, fleksibel, dan terdokumentasi melalui media digital. Perubahan tersebut turut memengaruhi pengalaman pendidikan karena wali santri memperoleh akses informasi yang lebih mudah, sedangkan pesantren dituntut lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, digitalisasi administrasi juga dapat memunculkan tantangan berupa kesenjangan kemampuan teknologi antaraktor yang terlibat di lingkungan pesantren (Izza et al., 2025).

Komunikasi Pesantren

Komunikasi pesantren merupakan proses penyampaian informasi, nilai, dan aturan yang berlangsung di lingkungan pesantren untuk membentuk hubungan sosial antara pengurus, santri, dan wali santri. Dalam kajian sosiologi pendidikan, komunikasi pesantren dipahami sebagai sarana lembaga pendidikan dalam membangun budaya kelembagaan, membentuk perilaku warga pesantren, serta menjaga keteraturan sosial. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara formal melalui rapat, surat pemberitahuan, dan laporan administrasi, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai pesantren seperti amanah, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, komunikasi pesantren memiliki peran penting dalam menciptakan kepercayaan dan solidaritas sosial antara lembaga pendidikan dan masyarakat (Yusfriadi & Ridha, 2022)

Komunikasi pesantren dapat dilihat melalui beberapa kategori, yaitu aturan formal, kebiasaan harian, dukungan sosial, kontrol sosial, serta respons aktor terhadap kebijakan lembaga. Aturan formal tampak dalam adanya SOP administrasi, laporan pembayaran, dan pertemuan wali santri yang dilakukan secara rutin. Kebiasaan harian terlihat dari pola

komunikasi antara pengurus dan wali santri melalui media digital maupun komunikasi langsung. Dukungan sosial muncul ketika wali santri memberikan kepercayaan dan partisipasi terhadap program pesantren. Selain itu, komunikasi juga menjadi bentuk kontrol sosial karena keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pengelolaan lembaga. Respons aktor terhadap kebijakan pesantren menunjukkan bahwa komunikasi yang baik mampu mengurangi konflik dan memperkuat hubungan sosial di lingkungan pesantren (Nurdin, 2015).

Literasi Teknologi Wali Santri

Literasi teknologi wali santri merupakan kemampuan wali santri dalam memahami, menggunakan, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang diterapkan dalam sistem administrasi pesantren. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, literasi teknologi menjadi konsep analitis untuk melihat bagaimana perubahan praktik kelembagaan berbasis digital memengaruhi kualitas hubungan sosial, partisipasi masyarakat, dan pengalaman pendidikan santri. Kemampuan wali santri dalam mengakses informasi pembayaran, memahami sistem administrasi digital, serta menggunakan media komunikasi daring menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan pesantren. Dengan adanya literasi teknologi, wali santri tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat terlibat secara aktif dalam proses pengawasan dan komunikasi kelembagaan (Primajati et al., 2024).

Indikator literasi teknologi wali santri dapat dilihat melalui perubahan sikap, pola interaksi, capaian program, pengalaman subjektif, dan implikasi sosial yang muncul. Perubahan sikap tampak dari meningkatnya penerimaan wali santri terhadap penggunaan media digital dalam administrasi pesantren. Pola interaksi juga mengalami perubahan karena komunikasi lebih sering dilakukan melalui aplikasi pesan dan sistem informasi digital. Capaian program terlihat dari semakin efektifnya penyampaian informasi dan pengelolaan administrasi pesantren. Pengalaman subjektif wali santri dapat diamati melalui rasa aman, kemudahan akses informasi, serta meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga. Sementara itu, implikasi sosial yang muncul adalah terbentuknya budaya komunikasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis teknologi di lingkungan pesantren (Nurhadi et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bertempat di pondok pesantren Darussalam yang terletak di suatu wilayah tepatnya di desa Sokawera, kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Pondok pesantren Darussalam adalah sebuah lembaga pendidikan islam yang memiliki praktik pengelolaan keuangan yang cukup baik dengan menekankan penerapan transparansi keuangan. Karakter lembaga ini adalah berbasis pendidikan islam dengan sistem asrama, melibatkan wali santri dalam rapat dan memiliki SOP keuangan. Fokus kasus penelitian ini adalah akuntabilitas sosial pengelolaan keuangan, dengan analisis berupa interaksi dengan pengelola keuangan pesantren dan wali santri.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan desain studi kasus. Data utama diperoleh langsung melalui observasi lapangan terhadap mekanisme pembayaran dan pelaporan keuangan, serta wawancara dengan pengelola dan wali santri. Data pendukung di dapatkan dari dokumen kelembagaan seperti laporan pembayaran, laporan penggunaan dana dan, SOP pengelolaan keuangan.

Sumber data penelitian meliputi bendahara pondok, pengasuh dan wali santri yang terlibat dalam pengelolaan dana serta dokumen resmi pesantren. Informan dipilih secara purposive, karena mereka yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung terkait pengelolaan keuangan pesantren.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap mekanisme pembayaran dan pelaporan keuangan kepada wali santri; Wawancara dengan pengelola dan wali santri mengenai transparansi keuangan dan dampaknya terhadap kepercayaan; Dokumentasi berupa laporan pembayaran santri, laporan penggunaan dana dan SOP pengelolaan keuangan.

Analisis data dilakukan dengan langkah: kondensasi data yakni dengan merangkum hasil observasi, wawancara, dan dokumen. Selanjutnya penyejiaan data dalam bentuk narasi, penarikan kesimpulan serta verifikasi melalui triangulasi sumber (pengelola-wali santri), teknik (observasi,wawancara, dokumentasi) dan dokumen resmi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Pembayaran dan Penggunaan dana yang Meningkatkan Rasa Aman Wali Santri

Setelah dilaksanakannya observasi, didapatkan bahwa pemberitahuan keuangan terhadap wali santri dilakukan melalui WhatsApp grup, surat langsung serta dipaparkan saat ada rutinan bulanan pertemuan wali santri. Selain itu, sebelum dipaparkan ke wali santri, pengurus pesantren mengadakan rapat guna mempersiapkan laporan pemasukan dan pengeluaran dana. Informan wali santri mengatakan bahwa keterbukaan membuat mereka lebih tenang karena mengetahui alokasi dana. Dokumen pendukung berupa kwitansi pembayaran, catatan bendahara dan surat pemabayaran memperkuat temuan ini.

Aktor yang terlibat adalah bendahara, pengasuh dan juga wali santri. Bentuk kegiatan pertemuan bulanan, laporan tertulis, dan pemberitahuan atau surat. Frekuensi dari pertemuan wali santri itu dilakukan rutin setiap bulan, sehingga pelaporan keuanganpun rutin dilaksanakan setiap bulan. Respons yang di dapat dari wali santri juga positif, menunjukkan mereka merasa dilibatkan dan percaya akan pengelolaan dana pesantren.

Konteks sosial lembaga menunjukkan budaya lokal dari keterbukaan dan amanah sangatlah di tekankan. Selain karena islam sangat menjunjung sifat amanah, nilai amanah menuntut kejujuran dan menjadikan pesantren lebih bertanggung jawab dalam praktik kelembagaan. Di sisi lain, keterbukaan menjadi cara sosial untuk menjaga legitimasi lembaga di mata masyarakat. Struktur organisasi pesantren yang jelas menempatkan bendahara sebagai aktor dominan, serta wali santri menjadi penerima informasi. Tekanan eksternal berupa perlunya transparansi dari masyarakat membuat laporan menjadi semakin penting.

Sistem Pencatatan Keuangan yang Rapi dan Mengurangi Konflik Pengurus dan Wali Santri

Temuan kedua menunjukkan bahwasannya pencatatan keuangan di pondok pesantren Darussalam Sokawera dilakukan secara sistematis dengan pembagian dana bulanan ke dalam empat kategori : makan, syahriah, pembangunan pondok, dan madrasah diniyah. Wali santri diperbolehkan melihat catatan keuangan baik catatan masuk maupun keluar. Informan menyebutkan bahwa sistem ini mengurangi konflik dengan wali santri karena semua transaksi tercatat dengan jelas dan dapat di akses oleh wali sehingga juga menunjukkan transparansi itu sangatlah penting.

Faktor dari kebijakan pesantren, komunikasi rutin dan nilai amanah menjadi pondasi yang memperkuat sistem pencatatan keuangan. Kebijakan pencatatan detail setiap transaksi menciptakan administrasi yang jelas. Komunikasi lewat sarana pemberitahuan, surat dan pertemuan rutin memastikan wali santri tetap mendapatkan informasi terbaru, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik. Nilai atau norma amanah yang di tekankan di pesantren memperkuat legitimasi moral pengurus dalam mengelola dana. Relasi kuasa antara pengurus dan wali santri menjadi lebih seimbang. Dukungan sosial wali santri terhadap program pesantren, semakin memperkuat legitimasi sistem pencatatan sebagai mekanisme akuntabilitas sosial bukan sekedar administrasi. Modal sosial berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui jaringan dan kolaborasi antar guru (Hanif, 2016).

Berlakunya sistem pencatatan keuangan di pesantren menunjukkan adanya dinamika relasi sosial yang cukup kompleks. Bendahra sebagai aktor dominan menjadi pusat yang menjaga kredibilitas lembaga. Di sisi lain, wali santri diuntungkan memperoleh akses transparan keuangan, yang menuntut relasi antara pengurus dan wali santri lebih seimbang. Transparansi memang meminimalisir konflik, namun keterlambatan pembayaran menjadi salah satu tantangan yang dapat melemahkan sistem akuntabilitas. Untuk mengatasi hal tersebut, pesantren mengadakan pertemuan bulanan guna memberikan penjelasan terbuka dan wali santri diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana sosial yang memegang teguh nilai amanah, solidaritas dan sama-sama menjaga legitimasi pesantren di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan Kholidin dan Hanif (2025) yang menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan.

Makna Keterbukaan Informasi Keuangan yang Memperkuat Legitimasi Pesantren sebagai Lembaga Amanah

Temuan ketiga mendapati bahwasannya keterbukaan informasi keuangan memperkuat kepercayaan wali santri terhadap pihak pesantren. Akses terhadap keuangan dan laporan detail yang dapat di jangkau oleh semua bagian pesantren, menjadikan pesantren lebih dapat dipercaya di mata masyarakat. Implikasinya adalah legitimasi pesantren meningkat karna wali santri merasa bahwa mereka dilibatkan dalam

pengelolaan dana atau keuangan pesantren, mutu lembaga terjaga melalui dukungan finansial yang berkelanjutan dan aspirasi masyarakat dapat di dengar saat forum serta komunikasi rutin. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadi mekanisme yang menumbuhkan rasa aman dan partisipasi.

Data lapangan menunjukkan bahwasannya keterbukaan benar-benar menghasilkan dampak sosial, wali santri lebih percaya terhadap pengelolaan dana, konflik antar pengurus dan wali santripun dapat dihindarkan, dan dukungan sosial meningkat melalui partisipasi dalam program-program pesantren. Hal ini menegaskan bahwa keterbukaan memperkuat akuntabilitas sosial dan legitimasi pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis amanah.

Pembahasan

Makna Laporan Pembayaran dan Penggunaan Dana yang Meningkatkan Rasa Aman Wali Santri

Menurut informan laporan pembayaran dan penggunaan dana terbukti menjadi sarana penting untuk membangun rasa aman wali santri. Dengan adanya laporan yang jelas dan akses yang di mudahkan, wali santri tidak hanya mengetahui alokasi dana tapi juga merasa yakin bahwa uang mereka digunakan sesuai dengan kebutuhan santri dan pondok. Hal ini mendukung teori akuntabilitas sosial, karena sistem keterbukaan menjadi sarana membangun kepercayaan. Dalam konteks sosiologi pendidikan, laporan keuangan bukan sebatas catatan, tetapi menunjukkan relasi sosial yang memegang teguh nilai amanah.

Argumentasi di uji dengan laporan, apakah hanya formalitas atau benar-benar membangun kepercayaan. Data lapangan menunjukkan bahwa laporan membawa dampak nyata, wali santri semakin percaya, konflik yang hampir tidak pernah terjadi, dan pesantren semakin dianggap amanah. Jadi, laporan tidak hanya di lihat sebagai administratif, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara pengurus dan wali santri.

Sistem Pencatatan Keuangan yang Rapi

Sistem pencatatan keuangan yang rapi membawa relasi yang seimbang antara pengurus dan wali santri. Semua transaksi tercatat secara detail, sehingga tidak ada sanggahan atau pihak yang merasa dirugikan. Dari sisi pengalaman belajar, keteraturan

pencatatan memberikan suasana yang kondusif bagi para santri, orang tua bisa tenang dan tidak terbebani oleh ketidakjelasan biaya. Hal ini sejalan dengan pandangan Hanif et al (2023) yang menekankan bahwa keteraturan administrasi bukan hanya aspek teknis, melainkan juga fondasi legitimasi lembaga pendidikan.

Alokasi dana yang terperinci serta informasi yang dapat diakses oleh semua bagian pesantren terbukti dapat meningkatkan kepercayaan wali santri dan mengurangi konflik, karena meminimalisir pertanyaan dana alokasikan atau digunakan untuk apa.

Makna Keterbukaan Informasi Keuangan Memperkuat Legitimasi Pesantren sebagai Lembaga Amanah

Dengan adanya keterbukaan informasi menunjukkan arti penting hubungan sosial di pesantren. Keterbukaan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menjadi cara pesantren menunjukkan amanah dan tanggung jawab. Konsekuensinya, mutu lembaga terjaga karena wali merasa dilibatkan, dan aspirasi dapat tersalurkan melalui mekanisme komunikasi yang terbuka. Plummer (2022) menekankan bahwa akuntabilitas sosial dalam pendidikan harus dipahami melalui relasi aktor dan norma kelembagaan, sehingga keterbukaan keuangan dapat dipandang sebagai praktik nyata yang membangun kepercayaan kolektif.

Data lapangan menunjukkan bahwa keterbukaan menghasilkan dampak nyata, wali santri lebih percaya pengelolaan dana, konflik yang berkurang dan dukungan sosial meningkat. Hal ini menegaskan, bahwa keterbukaan bukan sekedar citra. Melainkan praktik akuntabilitas sosial yang memperkuat kepercayaan wali santri sekaligus legitimasi pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis amanah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi di Pondok Pesantren Darussalam Sokawera tidak hanya berfungsi sebagai perubahan teknis dalam pengelolaan administrasi, tetapi juga membentuk mekanisme sosial baru yang memperkuat hubungan antara pesantren dan wali santri. Melalui penggunaan aplikasi administrasi, grup WhatsApp, laporan pembayaran digital, dan forum komunikasi rutin, wali santri dapat lebih mudah memantau pembayaran, perizinan, serta informasi kegiatan pesantren. Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa pengasuh dan pengelola pesantren mampu menyampaikan informasi secara lebih cepat dan terbuka sehingga potensi miskomunikasi dapat diminimalkan. Di sisi lain, digitalisasi administrasi turut

menuntut kemampuan literasi teknologi wali santri agar mereka dapat memahami sistem yang diterapkan pesantren dan tetap terlibat aktif dalam proses komunikasi kelembagaan. Mekanisme sosial semacam ini hanya dapat dipahami secara mendalam melalui penelitian lapangan karena berkaitan langsung dengan pengalaman, interaksi, dan respons sosial para aktor di lingkungan pesantren.

Konsep Digitalisasi Administrasi, Komunikasi Pesantren, dan Literasi Teknologi Wali Santri terbukti mampu menjelaskan dinamika sosial yang terjadi dalam praktik pengelolaan administrasi pesantren. Konsep digitalisasi administrasi membantu memahami perubahan pola pelayanan dan keterbukaan informasi berbasis teknologi. Konsep komunikasi pesantren menjelaskan bagaimana lembaga membangun relasi sosial, budaya amanah, dan kepercayaan melalui komunikasi yang rutin dan terbuka. Sementara itu, konsep literasi teknologi wali santri memperlihatkan bahwa kemampuan memahami teknologi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas komunikasi dan administrasi pesantren. Selain itu, penggunaan metode studi kasus kualitatif juga dinilai tepat karena mampu menggambarkan realitas sosial secara lebih mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga hubungan antara teknologi, komunikasi, dan kepercayaan sosial dapat dianalisis secara kontekstual.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Studi hanya dilakukan pada satu lokus penelitian, yaitu Pondok Pesantren Darussalam Sokawera, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pesantren di Indonesia. Selain itu, jumlah informan yang terbatas, waktu observasi yang relatif singkat, serta keterbatasan akses terhadap beberapa dokumen internal pesantren juga menjadi hambatan dalam memperluas analisis penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan perbandingan lintas lembaga pendidikan pesantren agar dapat melihat perbedaan praktik digitalisasi administrasi dan pola komunikasi di berbagai konteks sosial. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* agar mampu menggabungkan kedalaman data kualitatif dengan pengukuran kuantitatif mengenai tingkat kepercayaan, efektivitas komunikasi, dan literasi teknologi wali santri.

DAFTAR REFERENSI

Anwar, H. S., Denata, R., & Firdaus, A. I. I. (2023). Digitalisasi Pendidikan Pesantren melalui Sistem Pembayaran Cashless Menggunakan Ngabar Smart Payment di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 43–53.

- Ballantine, J. H., Stuber, J., & Everitt, J. G. (2021). *The Sociology of Education* (9th Editio). <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003023715>
- Hanif, M. (2016). *Muh. Hanif, Modal Sosial dalam Perbaikan Mutu Pendidikan 2.pdf* (mawi khusni Albar (ed.); 1 ed.). lontar mediatama. [https://repository.uinsaizu.ac.id/18877/1/Muh. Hanif%2C Modal Sosial dalam Perbaikan Mutu Pendidikan 2.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/18877/1/Muh.Hanif%2C%20Modal%20Sosial%20dalam%20Perbaikan%20Mutu%20Pendidikan%202.pdf)
- Hanif, M., Dharin, A., & Hutauruk, meysia E. (2023). *Management of Social Entrepreneurship in Indonesian Islamic Boarding Schools*. 13(3), 375–385. <https://doi.org/10.47750/pegegog.1>
- Hanif, M., Mukroji, Suwito, H., Mubaroq, A. C., & Abu, D. (2024). *Pesantren Resistance to Indonesia's National Curriculum to Defend Its Curriculum Model*. 1–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.37948>
- Izza, A. F., Nabila, P. A. D., & Zuhriyah, I. A. (2025). Pemanfaatan Digitalisasi Pesantren Melalui Sistem Administrasi dan Pelaporan Pendidikan Berbasis Aplikasi Santri App. *TARLIM Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83–98. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v8i1.2967>
- Kholidin, & Hanif, M. (2025). *Efisiensi Anggaran dalam Manajemen Keuangan Sekolah di Saerah Terpencil*. 10. <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/5473/2311>
- Maela, S. N., & Hanif, M. (2025). *Digitalisasi Manajemen Keuangan Pesantren melalui Implementasi Aplikasi CARDS*. 8(2). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5399619>
- Mustafa, Abdullah, A., Alhidayatillah, N., & Astuti, D. P. (2023). From Inequality to Digital Inclusion : Opportunities and Challenges of Digitalization among Santri in Indonesia Dari Kesenjangan ke Inklusi Digital : Peluang dan Tantangan Digitalisasi di Kalangan Santri di Indonesia. *SENTIMAS: Seminar Nasional dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 336–342.
- Nurdin, A. (2015). Tradisi Komunikasi di Pesantren. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 23(2), 275–294. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.727>
- Nurhadi, Z. F., Salamah, U., Fadhilah, M. I., & Mogot, Y. D. Y. (2022). Makna Pesan Etika Menggunakan Media Sosial Bagi Santri di Era Transformasi Digital. *Jurnal Common*, 6.
- Plummer, K. (2022). *Sociology; The Basics; Third Edition*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003158318>
- Primajati, G., Firmansyah, D., Hidayat, A. S. E., Soraya, S., & Kusuma, W. (2024). Peningkatan Literasi Digital untuk Aktualisasi Diri Santriwati di Pondok Pesantren. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 2(4), 743–752.
- Ramadhani, S., Yasifa, A., & Rizky, R. (2024). Digitalisasi Administrasi di MI. *Jurnal Mappesona*, 7(2), 65–74.
- Sumiyati, & Aini, Q. (2025). Perencanaan Digitalisasi Terhadap Sistem Informasi dan Pengelolaan Pondok Pesantren Al-Qomar di Era 4.0. *Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Keagamaan*, 9(02), 606–620.
- Yusfriadi, & Ridha, M. (2022). Pengaruh Komunikasi Kelompok Terhadap Pembinaan Organisasi Santri (Studi Penelitian Di Pasantren Dayah Jeumala Amal Lueng Putu Kabupaten Pidie Jaya). *Jurnal Seumubeuet: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–4.